

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan umat manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap orang, dengan pendidikan setiap orang dapat menjadi manusia-manusia berkualitas yang akan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka jalur pendidikan non formal menjadi sarana yang tepat. Hal ini disebabkan pendidikan luar sekolah melakukan pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat dan berkelanjutan sehingga potensi yang dimiliki seseorang dapat dikembangkan secara maksimal.

Pendidikan Non Formal yang istilahnya saat ini telah dirubah menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebenarnya bukanlah barang baru dalam khasanah budaya dan peradaban manusia. Pendidikan Non Formal telah hidup dan menyatu di dalam kehidupan setiap masyarakat jauh sebelum muncul dan memasyarakatnya sistem persekolahan. pendidikan non formal mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan persekolahan. Pendidikan non formal timbul dari konsep pendidikan seumur hidup dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan/pendidikan formal saja. Pendidikan Non Formal pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu.

Pengelolaan program pendidikan harus diakui sebagai salah satu upaya yang diarahkan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkemampuan untuk menumbuhkembangkan motivasi berkreasi yang diwujudkan dalam bentuk karya yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, bangsa dan negara yang dilandasi oleh sikap, pengetahuan dan keterampilan serta budi pekerti yang luhur.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengakuan terhadap pengelolaan program pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mendorong terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Pengelolaan program pendidikan nonformal lebih mengedepankan prinsip demokratisasi dan fleksibilitas yang memberikan kesempatan dan kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan kegiatan belajar yang diyakini sebagai kebutuhan belajar yang sangat diperlukan (*community based education*), baik dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan maupun untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu melalui program pendidikan yang relevan.

Sehubungan dengan hal tersebut sejak tahun 1998, Ditjen Diklusepora telah mengembangkan inovasi pengelolaan program pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didirikan berdasarkan keinginan dan kebutuhan belajar masyarakat dengan memperhatikan filosofi pendirian PKBM, yakni dari, oleh dan untuk masyarakat (Depdiknas, 2006:78). Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan PKBM, baik yang didirikan atas prakarsa masyarakat secara individu maupun kelompok dapat diasumsikan sebagai indikator semakin membaiknya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap esensi pendidikan. Secara implisit kondisi ini juga menjadi merupakan pengakuan masyarakat terhadap pendidikan nonformal melalui pengelolaan program pendidikan keaksaraan fungsional, kelompok bermain, pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), pendidikan keterampilan dan program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran.

Untuk menghasilkan lulusan yang optimal, maka diharapkan pihak SKB untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal ini tutor sebagai ujung tombak keberhasilan warga belajar harus memiliki disiplin ilmu yang relevan dengan profesi yang dilaksanakan, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Program yang diselenggarakan sesungguhnya telah banyak membantu masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang menguntungkan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya yang didukung dengan ijazah, sertifikat ataupun bentuk surat keterangan tamat pendidikan dan pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik program, kebijakan pemerintah dan peraturan yang berlaku.

Sisi lain perjalanan PKBM memperlihatkan adanya sejumlah PKBM yang dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan nonformal. Tantangan yang dihadapi justru lebih sering dianggap sebagai masalah dalam manajemen institusi dan operasional program. Secara umum permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan PKBM didominasi oleh faktor keterbatasan dana serta faktor motivasi dan partisipasi masyarakat yang cenderung mengalami penurunan pada pengelolaan program.

Sehubungan kondisi pada sejumlah PKBM sebagaimana diuraikan diatas, perlu dilakukan kegiatan pengkajian dan penelitian yang difokuskan pada persepsi masyarakat yang sesungguhnya terhadap PKBM serta kontribusi peran dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat yang sungguh-sungguh merindukan kesempatan pembelajaran dan peningkatan kualitas diri dalam pendidikan.

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UNESCO dalam Humojoyo (2009:23) pendidikan hendaknya dibangun dengan empat pilar, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.

Pada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini

dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset mutakhir di bidang neuroscience dan psikologi maka fenomena pentingnya PAUD merupakan keniscayaan. PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut *the golden age* (usia emas).

Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 maka sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Dalam upaya pembinaan terhadap satuan-satuan PAUD tersebut, diperlukan adanya sebuah kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi anak usia dini yang berlaku secara nasional. Kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi adalah rambu-rambu yang dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum dan silabus (rencana pembelajaran) pada tingkat satuan pendidikan.

Kita sudah lama mengeluhkan mutu pendidikan, tidak terhitung kritikan dan keluhan yang dialamatkan kepada dunia pendidikan. Mulai dari yang mengerti masalah pendidikan sampai pada kalangan masyarakat yang hanya sekedar ikut-ikutan. Semua pendidik saling menyalahkan, Pendidikan Tinggi mempersalahkan pendidikan menengah, pendidikan menengah menyalahkan pendidikan dasar. Begitu selanjutnya bagaikan sebuah lingkaran setan tidak berujung, kusut tanpa diketahui bagaimana masalah pendidikan ini dapat terselesaikan. Dari sikap saling menyalahkan tersebut tidak satupun yang

menyalahkan pendidikan Anak Usia Dini atau pendidikan prasekolah. Ini suatu bukti bahwa pemahaman masyarakat tentang PAUD masih rendah dan menganggap PAUD atau pra sekolah hanya sebagai pelengkap, dianggap remeh, dan boleh jadi tidak begitu diperlukan. Padahal kegagalan pendidikan seringkali selama ini karena persoalan-persoalan yang dianggap remeh dan mudah.

Konsekuensi dari keterpaksaan pemerintah menetapkan prioritas pendidikan dasar pada Pendidikan Dasar 9 Tahun mengakibatkan pendidikan anak usia dini (usia 0-6 tahun) kurang mendapat prioritas. Pada tahun 2013 partisipasi dalam PAUD baru 28,3 juta (46 %) dari 13.223.812 jiwa anak. Kebijakan ini baik secara langsung atau tidak langsung telah menelantarkan kesempatan anak sebanyak 54 % penduduk untuk bertumbuh dan berkembang dengan optimal karena ketiadaan kesempatan mengikuti PAUD. Dapat dibayangkan anak-anak yang 54 % ini akan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, yang barangkali sebagian besar akan menjadi beban masyarakat bangsa dan negara di masa yang akan datang (Direktorat PAUD, 2013: 18).

Hasil penelitian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari berbagai sudut pandang penelitian telah menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah masa emas "*golden age*" periode perkembangan kognitif, bahasa dan sosial emosional mengalami titik puncaknya. Keterlambatan stimulasi pada usia ini mempunyai efek jangka panjang dalam kehidupan seorang manusia. Dengan kata lain keterbatasan perkembangan kognitif, bahasa, sosial dan emosional adalah implikasi dari keputusan negara yang merugikan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian pendidikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak anak, kesehatan anak, kesiapan anak bersekolah, kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik di masa selanjutnya, jika dibandingkan dengan anak-anak yang kurang terdidik pada usia dini. Hasil penelitian tentang anak usia dini ini, setidaknya menyadarkan kita bahwa pendidikan dasar 9 tahun yang ditetapkan pemerintah (SD dan SLTP) belum mendasar dan berdasar sehingga belum memperkuat dasar pendidikan yang sesungguhnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan tidaklah mungkin hanya diselesaikan pemerintah. Kebiasaan pendidikan masyarakat menunggu program yang digulirkan oleh pemerintah, disamping membutuhkan biaya yang besar juga terkendala oleh keterbatasan pendanaan pemerintah. Pendidikan yang kurang melibatkan masyarakat disamping tidak bersifat mendidik masyarakat, juga menumbuhkan sikap pasif, apatis yang dapat menjadi benalu dalam pendidikan. Untuk itu pemecahan masalah pendidikan bersifat komprehensif dan taktis, perlu melibatkan dan memperkuat pola pikir setiap lini masyarakat. Esensi pendidikan lebih dari hanya sekedar pengetahuan tetapi bagaimana membangun sikap positif terhadap nilai-nilai yang membangun dan keterampilan hidup. Oleh sebab itu pemerintah, keluarga dan masyarakat harus bekerja sama dalam pengasuhan untuk kehidupan anak yang lebih baik.

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai substitusi pendidikan dasar yang tidak berdasar dan mendasar perlu melakukan terobosan yang lebih mengakar pada esensi permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan tersebut adalah terbatasnya akses terhadap PAUD yang disebabkan oleh masalah geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan-kebijakan pemerintah utamanya yang berpihak kepada anak. Kebijakan yang berpihak pada anak terkait upaya optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan melalui pengasuhan dan pendidikan anak yang berkualitas.

Kebijakan pendidikan selama ini belum memikirkan input sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara input, proses dan *output*. Sifat menyalahkan input pendidikan sebelumnya tanpa memperbaiki pendidikan PAUD sebagai akar persoalannya adalah suatu bukti bahwa pendidikan di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum dikembangkan secara komprehensif dan sistemik. Sehubungan dengan itu maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam yang diformulasikan dengan judul "Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di PKBM Flamboyan di Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango".

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan anak usia dini (KB) di PKBM Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango?
2. Faktor apa yang mendukung terlaksananya program pendidikan anak usia dini (KB) di PKBM Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (KB) di PKBM Flamboyan Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (KB) di PKBM Flamboyan Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan pendidikan, khususnya pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) di PKBM Flamboyan Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.
 - b) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap peningkatan pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) di PKBM Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kinerja pengelola, dan berguna untuk pengembangan pendidikan khususnya menyangkut pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini yang efektif.